



TELAH TEORITIS: INTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM BUDAYA SEKOLAH

Sri Hapsari

Universitas Indraprasta PGRI

Email: hapsarisri@yahoo.com

Naskah diterima: 15 September 2015, direvisi: 24 November 2015, disetujui: 17 Desember 2015

Abstract

This article provides an theoretical overview of the internalization of democratic values in the school culture. The concept of democratic values in school culture obtained through study of literature. Democratic values considered important for the student as early as possible. Through the school culture, democratic values will be effectively internalized. These value aren't theoretical, but the values of democratic is implemented in the life of the school with school culture. School culture is interpreted as the norm; value; school rules that are binding on the entire school community. Democratic values that can be applied at schools such as transparency, resolve the issue peacefully, regularly class elections management, acknowledging the diversity in the schools, and so on.

Keywords: democratic values; school culture

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran teoritis tentang internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah. Konsep nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah diperoleh melalui studi kepustakaan. Nilai-nilai demokrasi penting ditanamkan pada diri siswa sedini mungkin. Melalui budaya sekolah, nilai-nilai demokrasi yang diperkenalkan akan terinternalisasi lebih efektif. Nilai-nilai ini sifatnya tidak hanya teoritik namun diimplementasikan dalam kehidupan sekolah melalui budaya sekolah. Budaya sekolah dimaknai sebagai norma; nilai; aturan yang ada di sekolah yang sifatnya mengikat seluruh warga sekolah. Nilai-nilai demokrasi yang dapat diterapkan di sekolah seperti: keterbukaan, menyelesaikan persoalan secara damai, menyelenggarakan pemilihan pengurus kelas secara teratur, mengakui keanekaragaman dalam sekolah, dan sebagainya.

Kata kunci: internalisasi; nilai-nilai demokrasi; budaya sekolah

Pengutipan: Hapsari, S. (2015). *Telaah Teoritis: Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Budaya Sekolah*. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 2015, 184-193. doi:10.15408/sd.v2i2.2813.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2813>

A. Pendahuluan

Nilai-nilai demokrasi pada akhir-akhir ini telah memudar dan diperlukan kekuatan untuk memantapkannya menjadi suatu komitmen bersama. Nilai-nilai ini tidak begitu saja dapat tumbuh dalam diri tanpa suatu tekad yang kuat. Demokrasi dipandang sebagai suatu keniscayaan, mengingat semakin majemuknya masyarakat akibat mobilisasi yang tinggi bahkan Dewey menempatkan demokrasi sebagai, *way of life*¹.

Pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat mengembangkan diri mencapai kepribadian yang matang yang dapat menerima perbedaan ditengah kemajemukan. Pendidikan harus mampu membangun suatu komunitas yang memiliki karakter kukuh di tengah dinamika global yang sejatinya menuntut perubahan-perubahan transisional.

Namun nyatanya, praktek pendidikan belum mampu menggali potensi individu, terutama dalam mengembangkan diri mencapai kepribadian yang matang. Sebagai contoh, dalam lingkup nasional, sebut saja konflik yang terjadi pada rapat dewan kehormatan legislatif, yang sejatinya sebagai wadah menyampaikan aspirasi, menjadi ajang adu fisik yang tak layak dipertontonkan yang disebabkan karena ketidaksepakatan dalam sebuah musyawarah. Ditambah lagi dengan konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman dalam memaknai kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat memecah belah bangsa mereka tidak lagi menjunjung sikap saling menghargai.

Sedangkan pada lingkup yang lebih kecil di persekolahan, pola-pola pembelajaran dinilai kering dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pembelajaran masih berorientasi pada guru (*teacher oriented*). Guru bersikap otoriter dengan pendapatnya, menganggap pendapatnya paling benar. Ironisnya, guru secara terbuka menilai buruk pada gagasan yang dikemukakan siswa. Siswa menjadi tidak dapat berimajinasi dan minim kreativitas. Akibatnya, siswa menjadi tidak percaya diri dan yang lebih buruk lagi, siswa meniru untuk tidak menghargai pendapat orang lain. Padahal, melalui pendidikan, kebhinekaan harus dapat disatupadukan demi terwujudnya negara yang baik sebagaimana pendapat Aristoteles dan Plato, bahwa: Jalan menuju ke arah negara yang baik adalah melalui tersedianya warga negara yang baik.² Siswa perlu ditanamkan kesadaran akan keanekaragaman budaya sehingga mereka akan memandang keanekaragaman tersebut sebagai sesuatu yang positif untuk dihargai. Supardan memberikan semangat multikultural sebagai sebuah keniscayaan dengan memandangnya sebagai bumbu kehidupan bagi perekat bangsa-bangsa khususnya Indonesia.³

Data lain diperoleh penulis dengan melakukan survei kepada 30 siswa di SMPN 18 Tangerang Selatan mengenai sikap demokrasi pada siswa yang diwujudkan melalui toleransi dan tidak menyela pendapat yang hasilnya disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Studi Pendahuluan Sikap Demokrasi Siswa

No.	Sikap	SS	S	KK	K	TP	Total
1.	Toleransi	33,33%	43,33%	20%	3,33%	0%	100%
2.	Tidak menyela pendapat	26,67%	40%	20%	0%	13,33%	100%

Keterangan:

SS = Sangat Sering

S = Sering

KK = Kadang-kadang

K = Kurang

TP = Tidak Pernah

1 Jason M.C Price, *Democracy: A Critical Red Ideal* (Amerika, Journal of Thought Spring-Summer, 2007), h.13.

2 Endang Sumantri, *Pendidikan Politik* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), h. 14.

3 Dadang Supardan, *Manusia, Kekerasan, Multikultural, dan Transformasi Pendidikan* (Bandung: Risqi Press, 2015), h. 301.

Berdasarkan tabel 1. sikap toleransi yang dilakukan oleh siswa hanya sebesar 43,33%, tidak sampai separuh siswa bersikap toleransi terhadap siswa lain, bahkan sikap ini hanya kadang-kadang saja dipraktikkan yaitu sebanyak 20% siswa. Siswa yang sangat sering menahan diri untuk tidak menyela pendapat rekannya hanya 26,67% dan 40% sering tidak menyela pendapat rekan, sisanya kadang-kadang 20% dan tidak pernah tidak menyela, dalam arti selalu menyela pendapat rekan sebesar 13,33%.

Sikap hormat yang merupakan nilai dalam demokrasi, dapat diwujudkan dalam sikap toleransi. Meskipun toleransi dapat larut dalam relativisme netral yang berusaha melepaskan diri dari pertimbangan etis, namun toleransi merupakan salah satu ciri utama peradaban.⁴ Data yang lebih mengglobal disajikan Hahn mengenai level sikap toleransi yang dilakukan di 5 (lima) negara sebagaimana pada tabel 2.⁵

Data-data di atas mungkin hanya tampak di permukaan saja, yang lebih penting adalah peran sekolah melalui budaya yang dibangun dalam wilayahnya sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Budaya memberikan peran besar dalam terciptanya demokrasi, karena demokrasi tumbuh subur di dalam satu konteks sosial dan budaya.⁶

Internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah perlu diterapkan terutama dalam menjalani abad globalisasi. Pada era ini, batas-batas peradaban menjadi benturan antar peradaban, yang dianalogikan oleh Jurgen Habermas dengan: "menelan dunia dalam gerakan tanpa henti".⁷ Untuk itu, sistem pendidikan harus berdiri di atas landasan budaya yang menggambarkan kondisi masyarakat seperti yang diungkapkan Nicholas Hans bahwa: pendidikan adalah watak nasional suatu bangsa.⁸ Hal ini perlu dicanangkan guna mencapai cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan, karena pada hakikatnya pendidikan memberikan kesempatan seseorang untuk memiliki dan menguasai pengetahuan. Namun, setiap orang juga perlu memahami batas-batas dirinya dan orang lain.

Sekolah diyakini mampu menciptakan suatu budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah menjadi pondasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang digunakan oleh sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolahnya sendiri sebagai identitas diri, dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya. Dalam sekolah yang baik, juga terdapat komunitas intelektual dan moral yang kuat di kalangan orang dewasa.⁹ Sekolah merupakan lingkungan yang cerdas yang dapat mengubah cara berpikir anak.

Tabel 2. Level of Tolerance in Five Countries

<i>Agree Strongly or Agree that Members of Least-Liked Group Should:</i>	Denmark (%)	England (%)	Germany (%)	Netherlands (%)	United States (%)
1. <i>Need evidence to be arrested</i>	79	61	56	51	70
2. <i>Have right to trial</i>	86	66	72	67	80
3. <i>Be protected from wiretaps</i>	48	30	34	42	59
4. <i>Be allowed to distribute pamphlet</i>	45	37	13	27	47
5. <i>Be allowed to vote</i>	71	40	34	38	67
6. <i>Be allowed to be a member of organization</i>	44	31	17	30	46
7. <i>Be allowed to make a public speech</i>	40	38	11	44	42
8. <i>Be allowed to run for office</i>	35	25	15	23	35
9. <i>Be allowed to organize a rally</i>	34	22	16	22	38

4 Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa menjadi Pintar dan Baik*, terjemahan Lita S (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 65.

5 Carole L. Hahn, *Becoming Political: Comparative Perspectives on Citizenship Education* (New York: State University of New York Press 1998), h. 170.

6 Ronald Inglehart, *Budaya dan Demokrasi, Dalam Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, ed. Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 149.

7 Ming, Tu Wei, *Modernitas Berlipat Ganda: Penyelidikan Pendabulan ke dalam Implikasi Modernitas Asia Timur*. Dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (editor) (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 380

8 Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2.

9 Thomas Lickona, *op. cit.*, h. 457.

Klein mengatakan bahwa: Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang cerdas dan tanggap, yang serba kompleks, mengandung daya dorong, mungkin akan mengembangkan sifat dan keterampilan yang berbeda. Jika anak-anak dapat mengandalkan pada lingkungannya untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, maka mereka akan menjadi kurang tergantung pada orangtuanya sejak umur muda. Dia akan mendapatkan rasa mampu, atau ingin membuat prestasi. Pada dirinya tumbuh sifat-sifat ingin tahu, ingin menjajahi sesuatu, imajinatif, dan bersikap sebagai pemecah masalah-masalah sulit.¹⁰

Pendapat di atas sejalan dengan teori tabula rasa dalam aliran empirisme-nya John Locke. Anak diibaratkan seperti kertas putih. Pendidik (orang dewasa) dapat menuliskan apa saja dalam kertas putih tersebut. Bila pesan nilai yang ditulis, maka anak pun akan tumbuh dengan pribadi penuh nilai. Maka suatu budaya yang sarat dengan pesan moral (nilai-nilai demokrasi) perlu dikembangkan.

Melalui budaya sekolah, warga sekolah khususnya para siswa mampu membiasakan diri dalam berkehidupan demokrasi. Budaya sekolah akan mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan demikian, perlu internalisasi nilai-nilai demokrasi sebagai proses pendidikan pada siswa seperti yang dikemukakan Djahiri bahwa: Pendidikan adalah suatu upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung secara terus-menerus ke arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya¹¹. Nilai-nilai yang dijalankan ini memungkinkan terjalannya kerjasama diantara warga sekolah. Dengan demikian, akan memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*).

B. Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi dalam *Oxford English Dictionary* mendefinisikannya sebagai: *government by the people*¹². Demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi pemegang peranan. Dengan kekuasaan yang dimiliki (rakyat) maka kekuatan tersebut dapat dikendalikan.

Demokrasi sebagai salah satu istilah yang dipakai dalam politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polistaia*. *Polis* berarti negara kota, yakni suatu masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, sedangkan *taia* berarti urusan. Jadi, politik diartikan segala urusan yang berkenaan dengan negara, termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan¹³.

Kekuatan merupakan dasar politik, yang merupakan urusan yang berkenaan dengan negara, termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma dalam masyarakat¹⁴. Dalam demokrasi, penggunaan kekuasaan harus sesuai dengan batas; aturan; patokan keadilan, sesuai dengan kerangka definisi ilmu politik yang diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam bukunya *Power and Society* bahwa: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan¹⁵.

Demokrasi juga sering digunakan untuk menggambarkan proses, prosedur, dan pengambilan keputusan dalam kelompok, pendekatan kepemimpinan. Michael Apple menyatakan bahwa: “*characterises democracy as a contested concept and that the use automatically presupposes ongoing dialogue with other competing meanings.*”¹⁶

Carothers membedakan antara konsep demokrasi dan demokratisasi. Menurutnya, konsep demokrasi adalah: “*The political approach operates from what most political scientists would describe as a Dahlian conception of democracy. It highlights*

10 Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, terj. Sri Koesdiyantinah (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), h. 31.

11 Endang Sumantri, *op. cit.*, h. 32.

12 Jason M.C. Price, *op. cit.*, h. 13.

13 Endang Sumantri, *op. cit.*, h. 2.

14 *Ibid. op. cit.*, h. 32

15 *Ibid.*, h. 3.

16 Jason M.C. Price, *op.cit.*, h. 13.

the importance of genuine, competitive elections and sufficient respect for political and civil rights to ensure that citizens can participate meaningfully in democratic political processes."¹⁷

Sedangkan konsep demokratisasi dimaknai sebagai: *The political approach sees democratization as a process of political struggle in which political actors who can be clearly identified as democrats contend with nondemocratic forces*¹⁸. Dalam hidup berdemokrasi, setiap individu harus mampu mengatur dirinya sehingga hak-hak yang dimilikinya tidak berbenturan dengan hak-hak orang lain dalam hidup bersama seperti yang didefinisikan oleh Mantle-Bromley dan Foster bahwa demokrasi adalah: *The task of living together and governing ourselves*¹⁹. Howard dan Gould menyebutnya sebagai demokrasi sosial, yakni: "suatu jenis liberalisme tersendiri yang menjembatani jurang antara hak-hak individu dengan komunitas"²⁰. Dengan demikian, ada komitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, meskipun menciptakan demokrasi bukan hal mudah, namun bukan berarti hal yang tidak mungkin.

Sebaliknya, pandangan demokrasi yang terkesan keberpihakan pada kaum elite diungkapkan Noam Chomsky bahwa:

*Democracy..refers to a system of government in which elite elements based in the business community control the state by virtue of their dominance of private society, while the population observers quietly. So understood democracy is a system of elite decision and public ratification, as in the United States it self. Corresponding popular involvement in the formation of public policy is considered a serious threat*²¹.

Namun, pandangan yang lebih elegan disampaikan Toqueville bahwa demokrasi digambarkan sebagai: *hope and commitment, power, possibility, and promise*²². Demokrasi seakan memberi secercah harapan bagi terwujudnya keadilan. Suatu tuntutan dari kelompok-kelompok yang terjajah hak-haknya. Demokrasi merupakan kedaulatan pada rakyat. Mayo

merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga,
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah,
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum,
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*),
6. Menjamin tegaknya keadilan²³.

Carothers menjabarkan nilai demokrasi berdasarkan pada fitur pemerintahan seperti: "*transparency, accountability, and responsiveness*". Sedangkan Stanley E. Dimond merumuskan demokrasi di sekolah dengan program *Civics* sebagai berikut:

*Citizenship as it relates to school activities has two-fold meaning. In a narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of public office, and legal right and responsibility*²⁴.

Berdasarkan definisi di atas, inti dari *civics* adalah hak dan kewajiban warga dari sebuah negara. Penanaman nilai-nilai demokrasi tidak hanya bersifat teoritis namun perlu direalisasikan dalam perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keterhubungan dengan manusia lain dan alam sekitarnya.

Demokrasi sebagai sebuah yang ideal, sebagai nilai fundamental, sebagai sebuah pandangan hidup, memiliki makna historis yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi²⁵. Diwariskan mengandung arti bahwa diperlukan usaha untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Maka pendidikan adalah cara utama dan pertama dalam mentransformasikan nilai.

17 Thomas Carothers, "Democracy Assistance: Political Vs. Developmental?" In *Journal of Democracy* Vol. 20 Number 1, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, 2009, h. 7.

18 *Ibid, loc. cit.*

19 Corinne Mantle-Bromley and Ann M. Foster, "Educating for Democracy: The Vital Role of the Language Arts Teacher", In *English Journal*, Vol. 94 No. 5, h. 70.

20 Dadang Supardan, *op. cit, loc. cit.*

21 Jason M.C. Price, *op.cit*, h. 14.

22 *Ibid*, h. 15.

23 Windrawawin, "Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah", dalam <http://windrawawin.wordpress.com>, diakses pada 12 Agustus 2015.

24 Muhammad Numan Somantri, *Mengagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 282.

25 Saifullah, "Kajian Doktorat di PPS UIN Sunan Kalijaga Demokrasi Bukan Sekedar Instrumen Politik Tetapi Nilai Yang Fundamental Dalam Hidup", dalam www.uin-suka.ac.id, diakses pada 11 Agustus 2015.

Lickona dalam bukunya Pendidikan Karakter menekankan sikap hormat dan bertanggung jawab, yang keduanya merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, sikap hormat dan bertanggung jawab sangat penting untuk: membangun kesehatan pribadi, menjaga hubungan interpersonal, membangun masyarakat yang demokratis dan berperikemanusiaan, membentuk dunia yang adil dan damai²⁶. Sikap hormat menunjukkan penghormatan terhadap sesuatu (seseorang). Dengan sikap hormat, maka akan muncul penghormatan terhadap otoritas orang lain. Sedangkan tanggung jawab merupakan perluasan dari sikap hormat. Jika seseorang menghormati orang lain, berarti ia menghargainya.

C. Hakikat Budaya Sekolah

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta 'budhayah' yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*, dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah/bertani²⁷. Budaya sulit untuk didefinisikan karena itu adalah inti dari siapa kita dan bagaimana kita ada di dunia. Hal ini berasal dari pemahaman yang diperoleh oleh orang melalui pengalaman dan pengamatan tentang bagaimana hidup bersama sebagai sebuah komunitas, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan fisik, pengetahuan, atau keyakinan. Deal menekankan bahwa: *culture is a concept that captures the subtle, elusive, intangible, largely unconscious force that shapes a society or a workplace*²⁸. Sedangkan menurut Barret tentang budaya: "*Culture as the body of learned beliefs, traditions, and guides for behavior that are shared among members of any human society*"²⁹.

Tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada akan mempengaruhi seseorang dalam beraktivitas. Elemen-elemen budaya ini mempengaruhi bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak. Kepribadian ini menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku pola masyarakat, menjadi *mental maps*, dan norma-norma sosial. Bower mengajarkan cara sederhana untuk berpikir tentang budaya sebagai: *the way we do things around here*³⁰.

Setiap organisasi memiliki budaya, sejarah yang mendasari harapan tidak tertulis yang membentuk segala sesuatu tentang sekolah. Sebuah budaya sekolah mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Mampu untuk memahami dan membentuk budaya adalah kunci keberhasilan sekolah dalam mempromosikan staf dan belajar siswa. Fullan mencatatnya sebagai: *Reculturing is the name of the game*³¹.

Saat sekolah memiliki budaya profesional, pengembangan staf yang berarti, sukses mereformasi kurikulum, dan pencapaian prestasi siswa, maka budaya ini berkembang dengan baik. Arends menekankan pentingnya budaya sekolah karena dapat: menciptakan pengaturan organisasi yang mempersatukannya dan memberinya kekuatan sebagai sebuah entitas sosial³².

Peterson & Deal mengartikan budaya sekolah sebagai: *the unwritten rules and assumptions, the combination of rituals and traditions, the array of symbols and artifacts, the special language and phrasing that staff and students use, and the expectations about change and learning that saturate the school's world*³³. Ini adalah harapan tertulis yang dibangun dari waktu ke waktu dari kerjasama antara guru, administrator, orang tua, dan siswa. Budaya sekolah selalu berkembang dan tidak pernah statis. Budaya sekolah dapat memberikan dampak pada seluruh elemen sekolah yakni: *School cultures transforming a student culture into one that is characterised by vision, collegiality, trust, values, broad member participation, positive personal and*

26 Thomas Lickona, *op. cit.*, h. 61.

27 Elly M. Setiadi; H. Kama Hakam; Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 27.

28 T.E. Deal, *Healing our Schools: Restoring the heart*, ed. A. Lieberman, *In Schools as Collaborative Cultures: Creating the Future Now* (London: Falmer, 1990), h. 132.

29 Etta R. Hollins, *Culture in School Learning* (London: Routledge, 2008), h. 18.

30 Kent D. Peterson; Terrence E. Deal, *The Shaping School Culture Field-book* (Second Edition, San Francisco: Jossey-Bass, 2009), h. 9.

31 M. Fullan, *Leading in a culture of change*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2001).

32 R.I. Arends, *Learning To Teach: Belajar untuk Mengajar*, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 146.

33 Kent D. Peterson; Terrence E. Deal, *op. cit.*, h. 9.

*organisational growth, empowerment, and continuous innovation*³⁴.

Guru bekerja dalam konteks budaya yang mempengaruhi setiap aspek pedagogi mereka. Budaya mempengaruhi semua aspek sekolah seperti *if culture change, everything changes*³⁵ serta *A schools culture can be defined as the traditions, beliefs, policies, and norms within a school that can be shaped, enhanced, and maintained through the schools principal and teacher-leaders*³⁶. Dengan demikian, sekolah memiliki misi moral yakni: mengajarkan nilai dasar dan sikap hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan³⁷. Sikap hormat merupakan prinsip utama demokrasi. Dengan sikap hormat ini maka akan menuntun seseorang untuk menciptakan suatu konstitusi yang adil.

Sekolah, seperti organisasi-organisasi lainnya, memiliki sejarah dan budaya berupa nilai-nilai, keyakinan, dan ekspektasi yang telah berkembang dan tumbuh dari waktu ke waktu. Budaya sekolah menciptakan pengaturan organisasi yang mempersatukannya dan memberinya kekuatan sebagai sebuah entitas sosial³⁸.

Budaya sekolah bukanlah entitas statis. Hal ini terus-menerus dibangun dan dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dan melalui refleksi tentang kehidupan. Budaya sekolah berkembang sebagai anggota staf yang berinteraksi satu sama lain, dengan siswa dan masyarakat. Hal ini menjadi panduan perilaku. Dalam hal ini, penting penanaman nilai moral pada siswa, seperti sikap hormat. Sikap hormat berarti menunjukkan penghormatan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan adanya sikap hormat maka lahir sopan santun dan tanggung jawab³⁹.

Pada sekolah-sekolah, *the nature of human activity* sangat penting, terlebih kita menyaksikan bagaimana ketidakharmonisan antar pelajar. Dengan memiliki dan ditanamkan norma kekeluargaan maka siswa pun dapat lebih aman

dan nyaman menjalankan kegiatan belajar serta adanya sikap untuk menghargai perbedaan. Arends memandang bahwa budaya sekolah menciptakan pengaturan organisasi yang mempersatukannya dan memberinya kekuatan sebagai sebuah etas sosial⁴⁰. Budaya sekolah akan membentuk cara-cara guru, siswa, dan administrator dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Ada 6 (enam) unsur budaya moral positif di sekolah, yakni:

1. Kepemimpinan moral dan akademis dari kepala sekolah;
2. Disiplin dalam seluruh lingkungan sekolah yang memberi teladan, mendorong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai di seluruh lingkungan sekolah;
3. Kesadaran komunitas di seluruh lingkungan sekolah;
4. Organisasi siswa yang melibatkan para siswa dalam mengurus diri sendiri dan menumbuhkan perasaan "ini adalah sekolah kami, sehingga kami bertanggung jawab untuk menjadikannya sebagai sekolah terbaik;
5. Sebuah atmosfer moral yang di dalamnya terdapat sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang meresap ke dalam semua bentuk hubungan-baik hubungan di antara orang dewasa di sekolah maupun antara orang dewasa dengan anak-anak;
6. Menjunjung arti penting moralitas dengan memberi waktu khusus untuk menangani urusan moral⁴¹.

D. Internalisasi Nilai-nilai Demokrasi

Dalam proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, guru harus mengatasi kebiasaan-kebiasaan umum di sekolah yang lazim dan diterima seluruh warga sekolah. Hal ini untuk membuat suatu pengalaman yang menantang, agar seluruh siswa secara bersama mendukung pengembangan keterampilan demokrasi. Selain itu, sekolah yang ingin mengajarkan nilai, harus meyakini bahwa: (1) Terdapat nilai-nilai

34 S.E. Lucas & J.W. Valentine, *Transformational Leadership: Principals, leadership teams, and school culture* (New Orleans: Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association, 2002), h. 24.

35 T. Donahoe, *Finding The Way: Structure, Time, and Culture in School Improvement*, ed. M. Fullan, In *The Challenge of school change*, (Illinois: Skylight Training and Publishing, 1997).

36 Short & Greer, *Defining the School's Culture*, dalam ward.qxd, 1997, h.1.

37 Thomas Lickona, *op. cit.*, h. 63.

38 R.I. Arends, *op. cit.*, h. 145-146.

39 Thomas Lickona, *op. cit.*, h.

40 R.I. Arends, *op. cit.*, h. 146.

41 Thomas Lickona, *op. cit.*, h. 415.

universal yang disepakati bersama dan berharga sehingga dapat dan harus diajarkan sekolah di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik; dan (2) sekolah tidak boleh sekedar menyampaikan nilai-nilai tersebut, tetapi juga harus membantu para siswa memahami, menghayati, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut⁴².

Pendidikan demokrasi ini penting, karena memberikan hasil: *teaching students democratic knowledge, skills, and dispositions; ensuring equity and access for all children in all schools; developing educators who nurture students' individual talents in a democratic context; and ensuring that all educators act as good stewards of our nation's schools*⁴³.

Demokrasi yang dimaksud tentunya berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga siswa diharapkan memiliki watak dan kepribadian, dengan ciri-ciri:

1. Mengembangkan sikap hidup yang positif dan mengurangi sikap menggantungkan diri kepada nasib.
2. Mengembangkan sikap yang menilai tinggi disiplin, kesinambungan, kenikmatan dan mutu hasil kerja.
3. Mengukuhkan kembali sikap hidup selaras dengan alam.
4. Berorientasi kepada hidup dimasa depan, mengembangkan sikap tepat waktu dan kebiasaan berhemat.
5. Mengukuhkan nilai gotong royong, mengurangi sikap dan mental feodal dan mental pegawai, serta meningkatkan disiplin nasional dalam arti taat yang konkret kepada orang tua, komandan, pemimpin, pemuka agama, dan lain-lain seperti hokum dan prinsip⁴⁴.

Penerapan demokrasi dalam sekolah tentunya tetap memperhatikan aspek-aspek kesantunan sesuai budaya bangsa. Tahapan dalam pendidikan politik meliputi: 1) tahap pertama, meliputi: pengetahuan, pengertian, pemahaman; 2) tahap kedua, meliputi: penerimaan, penanggapan, penghargaan,

penjiwaan; 3) tahap ketiga: pengalaman dan penerapan⁴⁵.

Tahap pertama, merupakan tahapan yang paling mudah dicapai, yaitu dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik (*kognitif morality*). Tahap kedua, berkaitan dengan masalah sikap. Pada tahap ini lebih banyak membutuhkan usaha dan pematangan. Dan tahap terakhir, berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.

Sedangkan langkah-langkah dalam proses internalisasi nilai-nilai demokrasi meliputi: 1) *impulse* (dorongan dari dalam); 2) *experience* (mengalami); 3) *communication* (komunikasi); 4) *action* (tindakan)⁴⁶.

Nilai-nilai demokrasi perlu dibangun pada setiap diri dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan. Dengan kesadarannya itu, maka seseorang akan terdorong untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman yang dilalui ini, maka mereka akan belajar, seperti kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, maka perlu dibangun sebuah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah pesan dapat diterima oleh penerima tanpa bias-bias komunikasi. Dengan belajar teknik berkomunikasi, seseorang dapat membuat keputusan untuk mengambil tindakan. Percakapan (komunikasi) adalah jalan menuju pencerahan, Plato menyebutnya sebagai metode dialektika, yakni menguji kebenaran dari suatu dalil melawan dalil lain⁴⁷.

Dalam kehidupan sekolah, nilai-nilai demokrasi dapat diwujudkan dalam sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan diperlukan dalam rangka mentradisikan budaya demokratis yang bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan nilai keterbukaan sebagai berikut: 1) membiasakan untuk berbeda pendapat/diskusi secara bebas; 2) keterbukaan dalam proses musyawarah; 3) latihan yang merangsang sikap terbuka⁴⁸.

42 Ibid, h. 55.

43 Corinne Mantle-Bromley; Ann M. Foster, *op. cit.*, h. 73.

44 Rochiati Wiriaatmadja, *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional: Proses Sosialisasi dan Enkulturas Berbangsa di Kalangan Siswa SMAK 1 BPK Penabur di Bandung*, (Dalam Disertasi, Bandung: UPI, 1992), h. 133.

45 Endang Sumantri, *op. cit.*, h. 15.

46 Saifullah, *op. cit.*

47 Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 523.

48 Endang Sumantri, *op. cit.*, h. 16.

E. Penutup

Nilai-nilai demokrasi sangat penting ditanamkan pada siswa. Sekolah sebagai lembaga transformasi ilmu memegang tanggung jawab dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah. Pengenalan demokrasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti memberikan kebebasan pada siswa dalam mengemukakan pendapat, pemilihan pengurus kelas, dan sebagainya. Dengan terbentuknya suatu komunitas yang adil, maka setiap siswa akan belajar untuk bertanggung jawab. Sekolah harus mampu menjadi institusi yang mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi, karena nasib sekolah-sekolah kita dan nasib demokrasi kita memang saling terkait” (Lickona, 2013:437)⁴⁹.

F. Daftar Pustaka

- Arends, R.I. (2008). *Learning To Teach: Belajar untuk Mengajar*. Penerjemah Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carothers, Thomas. (2009). *Democracy Assistance: Political Vs. Developmental?* In Journal of Democracy Vol. 20, Number 1 January 2009. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Deal, T.E. (1990). *Healing our schools: Restoring the heart*. In A. Lieberman (ed), *Schools as Collaborative Cultures: Creating the Future Now*. London: Falmer.
- Donahoe, T. (1997). *Finding the way: structure, time, and culture in school improvement*. In M. Fullan (ed) *The challenge of school change*. Illinois: Skylight Training and Publishing.
- Fullan, M. (2001). *Leading in a culture of change*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hahn, Carole L. (1998). *Becoming Political: Comparative Perspectives on Citizenship Education*. New York: State University of New York Press.
- Hollins, Etta R. (2008). *Culture in School Learning*. London: Routledge.
- Inglehart, Ronald. (2006). *Budaya dan Demokrasi*. Dalam *Kebangkitan Peran Budaya*. Jakarta: LP3ES.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lickona, Thomas. (2013). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa menjadi Pintar dan Baik*. Penerjemah Lita S. Bandung: Nusa Media.
- Lucas, S.E & Valentine, J.W. (2002). *Transformational leadership: Principals, leadership teams, and school culture*. Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association, New Orleans.
- Mantle-Bromley, Corinne; Foster, Ann M. (2005). *Educating for Democracy: The Vital Role of the Language Arts Teacher*. In *English Journal* Vol. 94, No. 5 pg. 70.
- Ming, Tu Wei. (2006). *Modernitas Berlipat Ganda: Penyelidikan Pendabuluan ke dalam Implikasi Modernitas Asia Timur*. Dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (editor). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Peterson, Kent D.; Deal, Terrence E. (2009). *The Shaping School Culture Fieldbook. Second Edition*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Price, Jason M.C. (2007). *Democracy: A Critical Red Ideal*. *Journal of Thought*, Spring-Summer 2007.
- Saifullah. (2013). *Kajian Doktorat di PPS UIN Sunan Kalijaga Demokrasi Bukan Sekedar Instrumen Politik, Tetapi Nilai Yang Fundamental Dalam Hidup*. Dalam *uin-suka.ac.id*, diakses tanggal 14 September 2015.
- Setiadi, Elly M; Hakam, H. Kama A; Effendi, Ridwan. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

⁴⁹ Thomas Lickona, *op. cit.*, h. 437.

- Short & Greer. (1997). *Defining the School's Culture*. Dalam ward.qxd pg.1.
- Somantri, Muhammad Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumantri, Endang. (2003). *Pendidikan Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Supardan, Dadang. (2009). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supardan, Dadang. (2015). *Manusia, Kekerasan, Multikultural, dan Transformasi Pendidikan*. Bandung: Risqi Press.
- Toffler, A. (1992). *Gelombang Ketiga*. Alih bahasa Sri Koesdiyantinah. Jakarta: Pantja Simpati.
- Windrawawin. (2015). *Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah*. Dalam <http://windrawawin.wordpress.com>.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (1992). *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional: Proses Sosialisasi dan Enkulturas Berbangsa di Kalangan Siswa SMAK 1 BPK Penabur di Bandung*. Dalam Disertasi. Bandung: UPI.